

Pekerja Wajib Vaksin demi Perlindungan Kesehatan

JAKARTA (IM)- Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Selatan, Sudrajat menilai ketentuan perusahaan mewajibkan vaksinasi bukan karena kepentingan ekonomi semata.

“Ketentuan yang tertuang dalam surat Nakertrans itu sebenarnya bukan semata untuk ekonomi tapi juga terkait dengan kesehatan agar menghindari risiko paparan,” kata Sudrajat, Senin (2/8).

Ketentuan yang dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1972 Tahun 2021 tentang memperbolehkan perusahaan esensial dan kritikal beroperasi dengan sejumlah persyaratan saat PPKM level 4.

Dalam persyaratan tersebut diatur bahwa pimpinan perusahaan hanya diperbolehkan pelaksanaan work from office (WFO) kepada pekerja/buruh yang telah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama.

Kewajiban vaksinasi untuk pekerja dianggap sangat penting untuk melindungi dari risiko terpapar Covid-19. “Bahkan kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan semua orang. Jadi kita mengajak semua elemen untuk berpartisipasi mewujudkan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, Sudrajat mengatakan bahwa ketentuan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity). Menurut dia, ketentuan tersebut sudah disosialisasikan secara masif kepada seluruh perusahaan melalui Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo).

Sudrajat mengatakan, pihaknya akan menindak tegas perusahaan yang melanggar, sesuai dengan tingkat pelanggaran. “Tingkat pelanggaran yang dilakukan akan mempengaruhi sanksi yang akan diberikan.

Sudah pasti kita akan tindak sesuai dengan tingkat pelanggaran. Tapi jangan sampai hal itu terjadi,” kata dia. ● **yan**

Jadi Syarat Kegiatan Usaha di DKI, Vaksinasi Covid-19 Terus Dikebut

JAKARTA (IM)- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, menyebut akan terus menggebut cakupan vaksinasi covid-19 di Ibu Kota. Hal itu sehubungan dengan penetapan syarat vaksinasi covid-19 dalam berbagai kegiatan usaha, sosial, budaya, hingga agama. Sebelumnya, Pemprov DKI menetapkan vaksinasi covid-19 dalam kegiatan usaha. Salah satunya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekrif) DKI No 495 tahun 2021 yang menyebutkan restoran, kafe, warung makan, dan salon yang berdiri sendiri boleh beroperasi melayani pengunjung di tempat.

Namun, baik karyawan maupun pengunjung sudah harus divaksinasi covid-19. Tidak hanya itu, kegiatan akad nikah di gedung juga sudah boleh dilaksanakan asalkan karyawan gedung, pengatur pelaksanaan pernikahan, hingga para partisipan yang hadir sudah divaksinasi covid-19.

“Ya, jadi kita akan mengupayakan semaksimal mungkin percepatan pelaksanaan vaksinasi covid-19 agar seluruh warga Jakarta 100% bisa mendapatkan vaksin. Dan juga dalam PPKM level 4 ini ada beberapa kebijakan yang mengharuskan untuk

memasuki satu unit kegiatan harus ada vaksin. Seperti yang sudah dikeluarkan oleh Kadis Pariwisata,” jelas Ariza di Balai Kota, Senin (2/8).

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan tujuan diadakannya wajib vaksinasi covid-19 sebagai syarat kegiatan usaha tidak lain untuk ingin memastikan kegiatan usaha juga tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga.

“Jadi maaf, untuk dipahami dimengerti warga Jakarta bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga, dan semuanya. Jadi vaksin ini berbeda dengan vaksin lainnya, seperti cacar dan lainnya. Vaksin ini penting karena kalau tidak divaksin bisa mengakibatkan penularan dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi kami minta semuanya segerakan melaksanakan vaksin di tempat masing-masing dan juga seluruh warga agar mendapatkan vaksin,” ungkapnya.

Ia pun menjamin stok vaksin covid-19 di Jakarta aman karena pemerintah pusat telah mengupayakan terdapatnya vaksin dari produsen. “Alhamdulillah stok vaksin di DKI Jakarta tidak ada masalah kita akan mengupayakan pelaksanaan vaksin sebaik mungkin,” pungkasnya. ● **yan**



VAKSINASI MERDEKA DI JAKARTA TIMUR

Sejumlah petugas medis mengukur tekanan darah warga sebelum mengikuti vaksinasi merdeka di Jakarta Timur, Senin (2/8). Dalam rangka menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menyediakan 900 gerai vaksin untuk warga dari tanggal 1-17 Agustus.

Menkes: Kematian di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksinasi

JAKARTA (IM)- Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebagian besar pasien meninggal akibat paparan Covid-19 di DKI Jakarta dan Jawa Barat lantaran belum divaksinasi. Hal tersebut dikatakan Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/8).

“Kematian di DKI dan Jawa Barat, yang meninggal sebagian besar belum divaksinasi. Yang meninggal sebagian belum divaksinasi,” ungkapnya.

Sementara itu diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai vaksin ampuh mengurangi resiko kematian akibat terpapar virus Covid-19. Menurut dia, seandainya ada penerima vaksin Covid-19 terpapar pun, bisa terhindar dari gejala berat.

Ucapan Anies berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Anies melaporkan penerima vaksin yang terpapar akibat Covid-19 hanya 2,3%. Dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang telah menerima vaksin.

Anies juga menyebut, dari 2,3% penerima vaksin yang terpapar Covid-19 umumnya tidak bergejala atau gejala ringan.

“Angkanya kecil sekali,” kata dia seperti yang dilihat dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (31/7).

Anies menerangkan, risiko kematian dapat hindari setelah orang mendapatkan vaksin Covid-19. Anies mencatat dari 4,2 juta orang KTP DKI Jakarta yang sudah divaksinasi, hanya 0,013% yang meninggal pascaterpapar Covid-19.

“Atau kira-kira 13 kasus per-100.000 penduduk. Itu yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah divaksin risikonya terbukti di lapangan jauh lebih kecil daripada mereka yang belum divaksin,” ujar dia.

Merujuk data itu, Anies kemudian membandingkan data kematian sebelum vaksin Covid-19 ditemukan dan diberikan kepada warga Jakarta.

“Yang sudah divaksin untuk case fatality ratenya atau tingkat kematian kasusnya menurun sampai kurang dari sepertiga dibanding mereka yang belum divaksin,” ujar dia.

Anies mengatakan, data tadi menunjukkan bahwa vaksin menurunkan risiko, kematian, dan gejala berat. Oleh karena itulah, Anies meminta semua pihak harus ikhtiar. “Ikhtiar untuk apa? Mengurangi risiko, meninggikan potensi keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan kita dengan cara melakukan vaksinasi,” tandas dia. ● **yan**

4|Metropolis



IDN/ANTARA

PENYESUAIAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK KEBERLANGSUNGAN USAHA

Warga melintas di depan toko-toko yang tutup di Pasar Baru, Jakarta, Senin (2/8). Sejumlah pelaku usaha mengharapkan pemerintah melakukan penyesuaian peraturan dalam pembatasan kegiatan masyarakat setelah berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada 2 Agustus 2021 guna mendukung kelangsungan usaha kedepannya.

BANYAK TARGET PEMPROV TAK TERCAPAI

Fraksi PDIP DPRD DKI Tolak Perubahan RPJMD

Saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI Jakarta seperti program Rumah DP o, OKE OCE, dan Naturalisasi Sungai. Namun target program tersebut di RPJMD banyak yang tidak sesuai target, kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono.

JAKARTA (IM)- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak perubahan RPJMD 2017 – 2020 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

siding paripurna, Senin (2/8). Fraksi PDI Perjuangan menilai jika hal itu hanya dalih atau alasan yang dibuat untuk justifikasi kinerja Gubernur Anies Baswedan

yang tidak mencapai target dalam melaksanakan RPJMD yang Gubernur rancang pada tahun 2017.

“Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, Senin (2/8).

Saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI Jakarta seperti program Rumah DP o, OKE OCE, Naturalisasi Sungai. Gembong pun menjelaskan target program tersebut di RPJMD banyak yang tidak

sesuai target.

“DP 0 targetnya 250.000, yang terbangun cuma 2.764, OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli, lalu ujug-ujug berubah jadi ‘Jakpreneur’, sampai tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?,” lanjut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

Ketua Fraksi pun menambahkan, Gubernur Anies Baswedan sangat tidak fokus dalam bekerja, dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja.

“Skala prioritasnya apa? Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 miliar, Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal

dengan pengguna jalan lain,” kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengajukan Raperda APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahun anggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017 – 2022 PERDA Nomor 1 Tahun 2018.

Gembong pun berpesan, Pemprov dan Gubernur jangan terlena dengan turunnya kasus aktif Covid-19, dan turunnya BOR (Bed Occupancy Rate) Rumah Sakit di DKI Jakarta. Jangan terlena seakan Covid sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih di bawah 40% seperti di Cakung Ciracas Duren Sawit, harus Pemprov turun dan ajak warga yang belum divaksin. ● **yan**

Ribuan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Depok Belum Terima BST

DEPOK (IM)- Ribuan pedagang pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat belum menerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Selain belum menerima, ribuan pedagang juga tidak mengetahui nominal BST. Ditemui di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok Senin (2/8), para pedagang mengatakan, seharusnya mereka menerima BST dari pemerintah lantaran mereka menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19.

“Kami belum menerima BST, nominalnya berapa kami juga tidak tahu,” kata Arshil salah seorang pedagang sayuran dihumbungi di Pasar Cisalak, Senin (2/8).

Hal serupa dialami ribuan pedagang lainnya di Pasar Tugu, Pasar Agung, Pasar Musi, Pasar Sukatani dan Pasar Kemiri Muka. Mereka mengaku kewalahan karena mereka belum menerima BST. “Para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional di 6 pasar tradisional ini telah mempertanyakan hal ini kepada pengelola pasar. Alhasil sampai kini belum dapat penjelasan,” kata Arshil.

Di masa PPKM level 4, kata Arshil, sebagian dari mereka banyak yang tidak berjualan karena ada pembatasan jam berjualan hanya sampai pukul 18.00 WIB. “Kebijakan ini berlaku sampai PPKM ini dinyatakan berakhir atau setelah kasus pandemi covid-19 mereda dan kondisi kembali normal,” ujarnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasar Cisalak, Budi Harianto membenarkan pedagang di pasarnya belum menerima BST. Namun, katanya Budi pedagang bakal mendapat BST. “Pedagang bakal mendapat BST. Paguyuban Pedagang Pasar Cisalak telah mulai mendata pedagang yang bakal dapat BST,” kata Budi, Senin (2/8).

Namun Budi enggan menjelaskan nominal BST yang bakal dibagikan kepada pedagang. “Nominalnya berapa kurang tahu. Kami (Pengelola) tahunya terima BST dari pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Dan informasi yang diperolehnya, tutur Budi, pasar tradisional yang jumlah pedagangnya di atas 1.000 orang hanya 400 pedagang yang menerima BST. Sementara pasar tradisional yang jumlah pedagangnya 250 yang dibagi BST hanya 100 pedagang. “Jadi tidak seluruhnya pedagang mendapatkan BST,” pungkasnya. ● **pp**

MRT akan Bangun Akses Jalan hingga Pagar Pembatas Makam di TPU Rorotan

JAKARTA (IM)- PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta siap membangun akses jalan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu sebagai bagian dari program sinergi untuk Jakarta dalam pengurangan pandemi Covid-19.

“Inisiatif sinergi untuk Jakarta, sekaligus bentuk dukungan terhadap Pemerintah (Provinsi DKI Jakarta) dalam penanganan Covid-19,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Persero), William Sabandar sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara, Senin (2/8).

“Ada kebutuhan untuk menyiapkan lahan pemakaman khusus Covid-19 di TPU Rorotan. Kami mengajak mitra kami dari bagian konstruksi (PT Jaya Konstruksi dan Jakpro),” kata dia.

Akses jalan tersebut diperuntukkan bagi alat berat yang beroperasi di lapangan dalam pematangan lahan petak pemakaman. Adapun materialnya diambil dari pembuangan tanah galian dari proyek MRT CP-201 di kawasan Monas (Jakarta Pusat), dengan total volume tanah mencapai 85.174 meter kubik. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta juga ikut membantu meratakan dan memadatkan tanah di TPU Rorotan yang teksturnya gembur, karena

sebelumnya merupakan kawasan persawahan.

Selain membangun akses jalan, MRT Jakarta juga akan membuat pagar proyek pembatas makam sepanjang 150 meter dari total 675 meter di TPU Rorotan. Pagar pembatas berfungsi untuk memisahkan area pemakaman yang sudah ada dengan area perluasan makam serta memisahkan antara jalan utama dengan tempat penguburan.

TPU Rorotan memiliki lahan seluas 3.000 meter persegi yang siap digunakan dari total luas lahan sekitar tiga hektare. Lahan tersebut disiapkan untuk menampung sekitar 7.200 petak makam. ● **pp**

sebelumnya merupakan kawasan persawahan.

Selain membangun akses jalan, MRT Jakarta juga akan membuat pagar proyek pembatas makam sepanjang 150 meter dari total 675 meter di TPU Rorotan. Pagar pembatas berfungsi untuk memisahkan area pemakaman yang sudah ada dengan area perluasan makam serta memisahkan antara jalan utama dengan tempat penguburan.

TPU Rorotan memiliki lahan seluas 3.000 meter persegi yang siap digunakan dari total luas lahan sekitar tiga hektare. Lahan tersebut disiapkan untuk menampung sekitar 7.200 petak makam. ● **pp**

sebelumnya merupakan kawasan persawahan.

sebelumnya merupakan kawasan persawahan.

Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau Vaksinasi di SMAN 15

KOTA BEKASI (IM)- Dalam rangka percepatan Vaksinasi Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto meninjau vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kodim 0507/Bekasi di SMA Negeri 15 Kota Bekasi, Kecamatan Bantargebang, Minggu, (1/8). Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala KCD Pendidikan Wilayah III, H. Asep Sudarsono, Danramil 05/Bt Gebang, Kapten Inf. Ruhiat, Sekcam Bantargebang, Kepala Sekolah SMAN 15 Bekasi, Ermayani Astuti, M.Pd, Babinsa dan Babinkamtibmas.

Kodim 0507/Bekasi menyediakan sebanyak 1000 vaksin, 800 vaksin untuk siswa/siswi, 200 vaksin untuk masyarakat sekitar. Dalam sambutannya Tri menyampaikan apresiasi kepada pihak TNI-Polri, nakes, dan pihak sekolah yang bersedia memberikan tempatnya untuk pelaksanaan vaksinasi.

“Terimakasih dan apresiasi saya haturkan kepada Pihak TNI-Polri, tenaga kesehatan, rekan-



FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 15 Kota Bekasi, Minggu (1/8).

rekan relawan yang terlibat dan terimakasih pula untuk pihak sekolah yang telah bersedia memberikan tempat untuk vaksinasi,” ujar Tri dalam siaran perd Humas Pemkot Bekasi, Minggu (1/8) malam.

Tri berharap, distribusi vaksin untuk siswa dan siswi di Kota Bekasi dapat rampung dalam

Bantuan Obat dan Sembako untuk Warga Isoman, Hubungi Pamor RW !

KOTA BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi menyediakan bantuan sembako dan obat-obatan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri melalui Ketua PPKM Tingkat RW yakni, petugas Pamor pada Satgas Covid masing-masing RW domisili.

Salah satu anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri, tulis siaran pers itu, silahkan lapor dan hubungi Pamor RW masing-masing, serta sebutkan data diri dan alamat, untuk dapat menerima bantuan obat-obatan dan sembako selama isolasi mandiri yang

nantinya akan diantar oleh petugas Pamor RW tanpa perlu menyerahkan berkas-berkas tertentu.

Bantuan obat-obatan dan sembako untuk warga yang sedang isolasi mandiri di tempat tinggalnya masing-masing disediakan Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan dibagikan secara gratis. Bantuan ini dapat terlaksana berkat bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan di Kota Bekasi yang disalurkan melalui BPBD Kota Bekasi. ● **mdl**



FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (menghadap kamera) dan petugas Pamor RW.